

## ABSTRACT

Indonesia still views LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) as an unusual phenomenon, and views LGBT groups or communities with negative stigma and tends to discriminate them. The existence of various forms of discrimination in the LGBT group also raises the issues of violence, both physical and psychological violence. Many cases of physical violence, terror attacks, forced dissolution of LGBT groups by certain mass organizations based on SOGIE (Sex, Orientation, Gender, Identity, and Expression) are considered different and of course these incidents have violated the right to freedom of association, right to protection and sense of security that should still be obtained by the LGBT as Indonesian citizens. Governments that should provide "more" protection to LGBT based on the constitutional mandate of the 1945 Constitution, have become violent actors, either indirectly or directly. This certainly shows the government's failure to approach and its sensitivity to the LGBT group, which gets more attention and then gets handled by Arus Pelangi NGOs. NGO Arus Pelangi as a civil society is more responsive to issues of dispossession of LGBT and SOGIE rights and advocates both rights. Together with other LGBT-based communities, Arus Pelangi NGO is in fact able to advocate in the handling of the cases relating to the deprivation of LGBT rights and SOGIE mainstreaming. Research on the Advocacy of Arus Pelangi NGO in fighting for the Basic Rights and SOGIE for LGBT can be a study related to the advocacy strategy undertaken by the community in advocating LGBT and SOGIE rights in Indonesia through the handling of cases of violence, national and international policy advocacy, education, campaign, as well as strengthening and organizational capacity building.

Keywords: SOGIE, Arus Pelangi, Transgender

## INTISARI

Indonesia masih memandang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sebagai fenomena yang tidak lazim terjadi, dan memandang kelompok atau komunitas LGBT dengan stigma negatif dan cenderung melakukan diskriminasi. Adanya berbagai bentuk diskriminasi pada kelompok LGBT juga memunculkan isu-isu kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis. Banyak terjadi kasus kekerasan fisik, serangan teror, pembubaran paksa terhadap kelompok LGBT oleh ormas-ormas tertentu berdasarkan SOGIE (Sex, Orientation, Gender, Identity, and Expression) mereka yang dianggap berbeda dan tentu saja peristiwa-peristiwa ini semua telah melanggar hak kebebasan berserikat, berkumpul, hak atas perlindungan dan rasa aman yang seharusnya tetap didapatkan kaum LGBT sebagai warga Negara Indonesia. Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan "lebih" kepada LGBT sesuai amanat konstitusi UUD 1945, justru menjadi aktor kekerasan, baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Hal ini tentunya

menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melakukan pendekatan dan sensitivitasnya terhadap kelompok LGBT, yang mana justru mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih oleh LSM Arus Pelangi. LSM Arus Pelangi sebagai *civil society* ini lebih tanggap terhadap isu-isu perampasan hak LGBT dan SOGIE dan mengadvokasi kedua hak tersebut. Bersama komunitas berbasis LGBT lainnya, LSM Arus Pelangi nyatanya mampu melakukan advokasi dalam penanganan kasus yang berhubungan dengan perampasan hak-hak kelompok LGBT dan pengarusutamaan SOGIE. Penelitian mengenai Advokasi LSM Arus Pelangi dalam memperjuangkan Hak Dasar dan SOGIE bagi kaum LGBT ini dapat menjadi sebuah penelitian terkait dengan strategi advokasi yang dilakukan oleh komunitas tersebut dalam mengadvokasi hak-hak LGBT dan SOGIE di Indonesia melalui penanganan kasus-kasus kekerasan, advokasi kebijakan nasional maupun internasional, pendidikan, kampanye, serta penguatan dan pengembangan kapasitas organisasi.

Kata kunci : SOGIE, Arus Pelangi, Transgender